

P D R B

Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran

TRIWULAN I
2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN
TRIWULAN I TAHUN 2021

Katalog BPS : 9302020.11
Nomor Publikasi : 11550.2106
Nomor ISSN : 2502.0889
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : ix + 53 Halaman

Penanggung Jawab/Pengarah : Ihsanurijal
Editor : Tasdik Ilhamudin, Maulana MS Aji
Penulis : Afrizah
Pengolah Data & Grafik : Afrizah
Penyunting dan Finalisasi : Maulana MS Aji
Cover : Afrizah
Infografis : Cahya Danu Rahman

Diterbitkan Oleh :

© BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik*

KATA PENGANTAR

Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB dilihat dari sisi pengeluaran dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

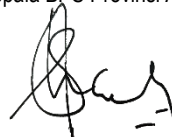
Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2021 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, Juni 2021

Kepala BPS Provinsi Aceh



Ihsanurijal

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar dan Tabel.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Infografis 1.....	ix
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga.....	4
1.2.2 Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga ...	5
1.2.3 Konsumsi Pemerintah.....	6
1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	6
1.2.5 Perubahan Inventori.....	8
1.2.6 Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	9
1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	9
1.2.8 Net Ekspor Antardaerah.....	9
1.3 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal (ILOR).....	10
1.4 Elastisitas Tenaga Kerja.....	12
II. Tinjauan PDRB Provinsi Aceh.....	17
2.1 Nilai PDRB Provinsi Aceh.....	17
2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.....	18
III. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran.....	19
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i>	23
3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i>	25
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera.....	26
Infografis 2.....	31

IV. Analisis Keterkaitan PDRB Dengan Ketenagakerjaan.....	33
4.1 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal/ <i>Incremental Labour Output Ratio (ILOR)</i>	35
4.2 Elastisitas Tenaga Kerja.....	36
Lampiran	39
Daftar Pustaka	51

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan I Tahun 2021 (Triliun Rupiah).....	17
Gambar 2. Nilai PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen).....	18
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>y-on-y</i> dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2021 (persen).....	23
Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> (Persen).....	24
Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> (Persen).....	25
Gambar 6. Pertumbuhan PDRB (<i>y-on-y</i>) Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 (Persen)	27
Gambar 7. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera (<i>y-on-y</i>) Triwulan I Tahun 2021 (Persen).....	28
Gambar 8. Laju Pertumbuhan PDRB (<i>q-to-q</i>) Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 (persen).....	29
Gambar 9. Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Aceh Triwulan I Periode Tahun 2015-2021 (Juta Rp/Orang).....	35
Gambar 10. ILOR Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2015-2021.....	36
Gambar 11. Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2015-2021.....	37
Tabel 4.1 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2015-2021.....	37

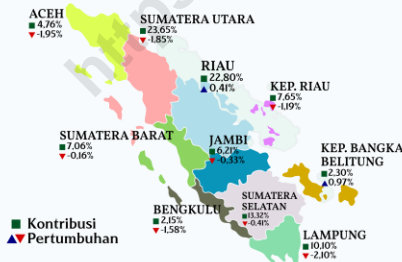
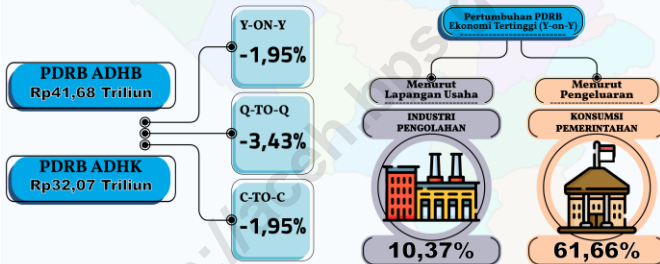
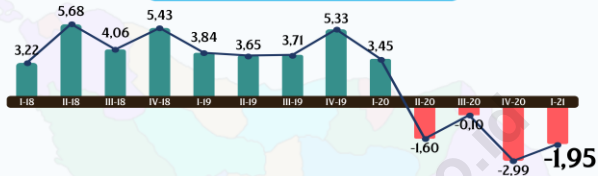
DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Triliun Rupiah)	41
Lampiran 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Triliun Rupiah)	42
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan <i>c-to-c</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen).....	43
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)	44
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan <i>q-to-q</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)	45
Lampiran 6. Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100) Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021.....	46
Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen).....	47
Lampiran 8. Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen).....	48
Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (persen).....	49
Lampiran 10. Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan I 2021.....	50

PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI ACEH TRIWULAN I TAHUN 2021

Berita Resmi Statistik No. 26/05/II/Th.XXIV, 05 Mei 2021

LAJU PERTUMBUHAN PDRB TRIWULANAN (Y-ON-Y)



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB REGIONAL SUMATERA

Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sumatera sebesar 23,65 persen dengan pertumbuhan -1,85 persen



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH

PENDAHULUAN

<https://aceh.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijakan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran.

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai triwulan IV tahun 2014 telah menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000.

Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/ jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain :

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telpon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya.
5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya.

Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *baby sitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dsj), perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRT, karena konsumsi LNPRT sudah menjadi komponen tersendiri. Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah

tangga, digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumah tangga didasarkan pada data Susenas, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun dimana data Susenas belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

1.2.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga

Pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh : PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi profesi (Orprof) dan serikat buruh,
4. Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi,
5. Partai Politik,
6. Lembaga keagamaan,

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu :

1. Perumahan,
2. Kesehatan,
3. Rekreasi, kebudayaan, dan olahraga,

4. Pendidikan,
5. Perlindungan/jaminan sosial,
6. Keagamaan,
7. Partai politik, organisasi buruh dan organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa lainnya.

1.2.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Yang juga termasuk PK-P adalah *social transfer in kind purchased market production*. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 2008, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri. Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB seri baru ini PKP diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

1.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
 - a. Bangunan tempat tinggal,
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal,
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, monumen, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air.
 - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari :
 - a. Alat-alat transportasi, seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain-lain,
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
 - c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,
 - d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Budidaya sumber daya hayati.
4. Produk kekayaan intelektual meliputi : *research and development*, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan *database*, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.
5. Sistem persenjataan.
6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi)

dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.

7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
8. Margin pedagang atau makelar jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas.
9. Barang modal lainnya.

1.2.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, pula pasir, dan gandum.

1.2.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga *free on board* atau f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction* dan *direct purchase non-resident* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa (BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik Ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction*, *direct purchase* penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik Impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.2.8 Net Ekspor Antardaerah

Nilai net ekspor antardaerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antardaerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah.

1.3 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal (ILOR)

Hubungan antara perubahan nilai output dengan penyerapan tenaga kerja dapat dirumuskan dalam indikator ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) dan Produktifitas Tenaga Kerja (PTK). Indikator ILOR atau disebut Rasio Tenaga Kerja – Output Marginal digunakan untuk melihat tambahan jumlah orang yang bekerja dengan adanya peningkatan satu satuan nilai PDRB. Sedangkan PTK untuk melihat seberapa besar kinerja dari setiap tenaga kerja dalam menghasilkan output.

ILOR adalah perbandingan antara perubahan tenaga kerja (ΔL) terhadap perubahan output (ΔY) perekonomian suatu wilayah. Perubahan tenaga kerja merupakan selisih antara jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor ekonomi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Sedangkan perubahan output didekati dengan selisih nilai tambah bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, selain menggambarkan tingkat efisiensi faktor tenaga kerja, juga dapat diketahui seberapa besar tenaga kerja yang dapat terserap per tahun jika terjadi penambahan output per satuan PDRB di suatu wilayah. *ILOR* dapat dinyatakan sebagai :

$$ILOR = \frac{\Delta L}{\Delta Y} \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

ΔL) = penambahan/penyerapan tenaga kerja

(ΔY) = penambahan output (didekati dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan)

Dengan menggunakan rumus (1) dapat diperoleh nilai ILOR untuk masing-masing komponen per tahun. Untuk mendapatkan angka ILOR dalam periode tertentu digunakan metode rata-rata sederhana. Rumus ILOR yang digunakan untuk periode t hingga periode t+i adalah sebagai berikut :

$$ILOR = \frac{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta L}{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta Y} \dots\dots\dots(2)$$

Disamping itu dapat diketahui juga mengenai produktifitas tenaga kerja menggunakan indikator Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) yang dinyatakan sebagai berikut

$$PTK = \frac{Y}{L} \dots\dots\dots(3)$$

dimana :

Y = Output (didekati dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku)

L = Labour (Jumlah tenaga kerja)

Meskipun secara teori ILOR dapat dihitung secara tahunan, namun besaran ΔL maupun ΔY jika dihitung setiap tahun bisa menjadi bias ketika ada fluktuasi tahunan dalam penyerapan tenaga kerja maupun kinerja ekonomi pada tahun tertentu ketika ada instabilitas. Oleh sebab itu, ILOR dihitung rata-rata per tahun dalam kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahunan.

Besaran ILOR dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dikaitkan dengan peluang penyerapan tenaga kerja, ILOR bermakna positif dalam arti setiap tambahan satu satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga semakin besar ILOR semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Tentunya, untuk melihat besarnya angkatan kerja yang tidak terserap masih harus melihat nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kedua, jika dikaitkan dengan produktifitas maka semakin besar nilai ILOR berarti tenaga kerja semakin tidak produktif karena nilai PTK semakin kecil. Sehingga kondisi ideal yang ingin dicapai tentu nilai ILOR rendah dan pada saat yang sama nilai TPT juga rendah. Artinya sedikit pengangguran sedangkan para pekerja masih mampu menghasilkan barang/jasa secara optimal sehingga tingkat keajahteraan diharapkan tercapai atau telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Jika besaran ILOR bernilai negatif berarti dalam kurun waktu tertentu ada ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output perekonomian. Ada kalanya telah terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja tetapi masih mampu menghasilkan nilai output yang cukup tinggi. Atau banyak tenaga kerja yang terserap tetapi justru terjadi penurunan nilai tambah bruto. Kedua hal tersebut akan sama-sama berdampak kurang baik pada dimensi sosial maupun ekonomi. Untuk daerah-daerah yang masih berkembang tentunya akan mengutamakan terserapnya tenaga kerja dalam jumlah besar terlebih dahulu pada tingkat produktifitas yang masih relatif baik.

Badan Pusat Statistik selaku penyedia data ketenagakerjaan melakukan survei Sakernas setiap dua tahun sekali yaitu untuk menggambarkan ketenagakerjaan pada Bulan Februari dan pada Bulan Agustus. Sampel yang digunakan pada Bulan Februari

lebih sedikit, dan dipakai hanya untuk menggambarkan ketenagakerjaan wilayah provinsi saja, sedangkan pada bulan Agustus sampel yang dipakai lebih banyak dan bisa dipakai untuk menggambarkan ketenagakerjaan sampai kabupaten/kota. Penghitungan *ILOR* triwulan I dihitung menggunakan data sakernas februari dan PDRB triwulan I. Estimasi olahan data sakernas februarui 2020 dan 2021 sudah menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015.

1.4 Elastisitas Tenaga Kerja

Secara teoritis terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas. Sementara keterkaitan erat juga ada pada tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah sehingga secara teori peningkatan ini menandakan adanya ekspansi dalam kegiatan produksi yang kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Tingkat Kesempatan Kerja adalah indikator yang menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dengan kata lain indikator ini menghitung peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja dihitung dengan mencari persentase dari perbandingan antara jumlah penduduk bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rumus Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

$$TKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Secara teoritis, ada tiga cara pokok untuk menciptakan kesempatan kerja atau berusaha dalam jangka panjang. Cara pertama adalah dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi penawaran tenaga kerja. Tetapi cara ini tidak memadai lagi bagi Indonesia karena angka kelahiran memang telah relatif rendah dan dampaknya terhadap pertumbuhan tenaga

kerja kurang signifikan dalam jangka pendek. Cara kedua adalah dengan meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output (*labour intensity of output*). Tetapi dalam jangka panjang, cara ini tidak selalu berhasil karena tidak selalu kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Cara ketiga adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis atau niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi riil, karena hubungan yang tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan *crucial* untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga "ramah" terhadap ketenagakerjaan (Mahalli, 2008: 128).

Menurut Case dan Fair (2007: 109) dalam ilmu ekonomi, dengan logika sederhana kita dapat mengetahui bagaimana perubahan dalam suatu variabel, seperti harga barang atau tingkat bunga cenderung mempengaruhi perilaku. Begitu juga dalam penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB suatu sektor meningkat maka permintaan terhadap tenaga kerja di sektor tersebut juga akan meningkat begitu juga sebaliknya jika PDRB mengalami penurunan maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja di setiap sektor ekonomi tersebut. Hal ini akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran. Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: yaitu persentase pertumbuhan tenaga kerja pertahun dibanding dengan persentase pertumbuhan PDRB pertahun. Rumus koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas } PTK = \frac{\% \text{ pertumbuhan jumlah tenaga kerja}}{\% \text{ pertumbuhan ekonomi (PDRB)}} \dots\dots\dots(5)$$

Secara umum elastisitas adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai dimana besar pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain dalam kurun waktu tertentu dengan nilai koefisien elastisitas berkisar antara nol dan tak terhingga. Perlu di ingat dalam perhitungan nilai elastisitas tanda minus (-) atau plus (+) sering di abaikan karena nilai yang negatif dikarenakan perubahan variabel yang satu ke variabel yang lain adalah menggambarkan perubahan ke arah yang berbalikan. Dengan

mengadopsi konsep elastisitas, analisis perubahan penyerapan tenaga kerja akibat perubahan pertumbuhan ekonomi akan digolongkan menjadi lima jenis tipe elastisitas yaitu elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis, inelastis, dan uniter. Pada kasus elastisitas penyerapan tenaga kerja, penjelasan kategori elastisitas tersebut adalah sebagai berikut:

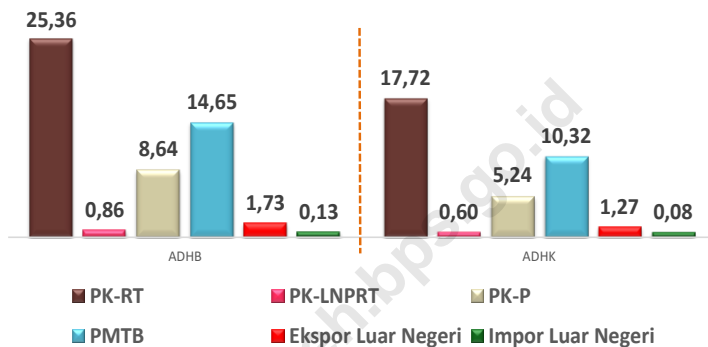
- a. Inelastis sempurna adalah perubahan PDRB tidak mengubah jumlah pertumbuhan jumlah tenaga kerja walaupun pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan atau penurunan. Nilai koefisien elastisitasnya adalah 0 (nol).
- b. Elastis sempurna adalah apabila pertumbuhan jumlah tenaga kerja akan tetap terjadi walaupun tidak terjadi pertumbuhan PDRB. Nilai koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga (∞).
- c. Elastisitas uniter adalah elastisitas yang mempunyai koefesien elastisitas permintaan sebesar 1 (satu). Elastisitas ini menggambarkan keadaan apabila persentase pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja.
- d. Tidak elastis (inelastis) adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih besar dari pada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai koefesien elastisitasnya kurang dari 1 (satu).
- e. Elastis adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai koefesien elastisitasnya lebih dari 1 (satu).

TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

<https://aceh.bps.go.id>

II. TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

2.1 Nilai PDRB Provinsi Aceh



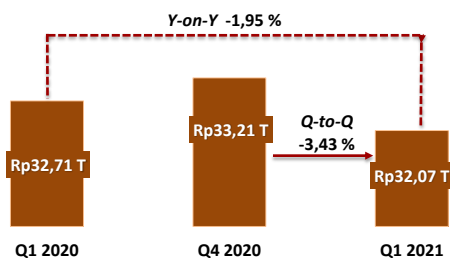
Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan I Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

Pada triwulan I tahun 2021, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Aceh adalah 41,68 triliun rupiah, sementara untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) adalah 32,07 triliun rupiah. Nilai PDRB Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen yang paling mendominasi, baik secara ADHB maupun ADHK 2010, masing-masing sebesar 25,36 triliun rupiah dan 17,72 triliun rupiah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan nilai PDRB kedua terbesar setelah komponen PKRT, yaitu secara ADHB sebesar 14,65 triliun rupiah dan ADHK 2010 sebesar 10,32 triliun rupiah. Selanjutnya nilai komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) ADHB sebesar 8,64 triliun rupiah dan nilai ADHK sebesar 5,24 triliun rupiah.

Sementara itu, nilai ADHB komponen lainnya, seperti komponen pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT), komponen ekspor luar negeri, dan komponen impor luar negeri mempunyai nilai dibawah 2 triliun rupiah, masing-masing sekitar 1,73 triliun rupiah, 0,86 triliun rupiah, dan 0,13 triliun rupiah. Begitu juga dengan ADHK 2010, nilai komponen lainnya juga dibawah 2 triliun rupiah, yaitu komponen pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,27 triliun rupiah, komponen ekspor luar negeri sebesar 0,60 triliun rupiah, dan komponen impor luar negeri sebesar 0,08 triliun rupiah.

2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Tinjauan perkembangan PDRB secara tahunan (*y-on-y*) triwulan I tahun 2021 menggambarkan perkembangan PDRB ADHK 2010 pada triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020. Perekonomian Aceh secara *y-on-y* mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,95 persen. Nilai kontraksi yang terjadi di Provinsi Aceh lebih besar dari kontraksi pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu hanya sekitar 0,74 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi masih sangat dipengaruhi oleh pandemi *covid-19* yang terjadi hampir di seluruh dunia.



Gambar 2. Nilai PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen)

Sementara itu, perekonomian Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) triwulan I tahun 2021 yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Aceh juga mengalami kontraksi yaitu sekitar 3,43 persen. Sementara itu, secara nasional, perkembangan ekonomi (*q-to-q*) juga mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sekitar 0,96 persen.

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

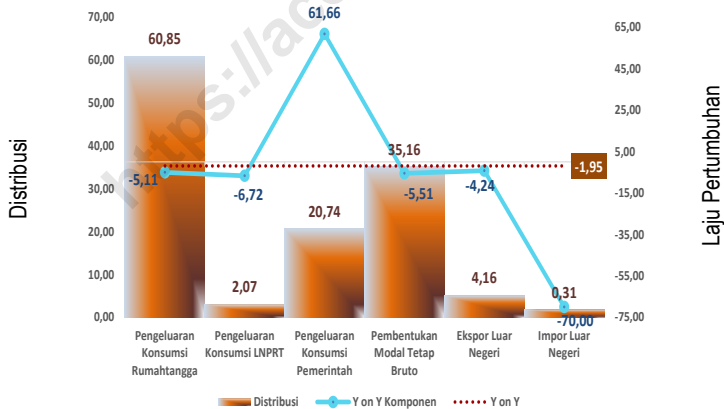
<https://aceh.br.go.id>

<https://aceh.bps.go.id>

III. PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y*

Perekonomian ekonomi Aceh secara *y-on-y* mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar 1,95 persen. Berdasarkan PDRB pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran, kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu sebesar 61,66 persen. Hal ini dipengaruhi oleh belanja pemerintah terkait covid-19 baik terhadap tenaga kesehatan dan berbagai kalangan masyarakat lainnya. Komponen impor luar negeri mengalami kontraksi pertumbuhan paling besar, yaitu sekitar 70,00 persen terutama pada impor jasa yang mengalami kontraksi pertumbuhan paling besar. Hal ini disebabkan diantaranya karena tidak tercatatnya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh.

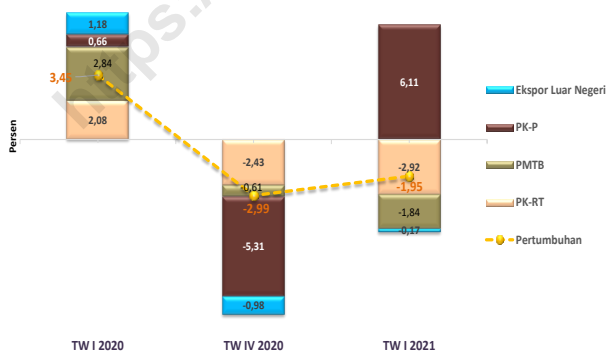


Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi *y-on-y* dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2021 (Persen)

Kontraksi pertumbuhan pada komponen impor luar negeri sejalan dengan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga mengalami kontraksi yaitu sebesar 5,11 persen. Hal ini terjadi hampir pada semua

subkomponennya kecuali kesehatan dan komunikasi, sedangkan paling besar terjadi pada subkomponen pakaian serta perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya. Sementara itu, distribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan peranan yang paling besar pada PDRB Provinsi Aceh yaitu mencapai 60,85 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami kontraksi pertumbuhan paling besar kedua yaitu 6,72 persen, tetapi komponen ini hanya memberikan andil sebesar 2,07 persen terhadap total PDRB. Sementara itu, komponen PMTB mengalami kontraksi pertumbuhan paling besar ketiga yaitu sekitar 5,51 persen, terutama pada subkomponen non-bangunan. Adapun secara distribusi, komponen PMTB memberikan peranan paling besar kedua terhadap PDRB, yaitu sekitar 35,16 persen. Komponen ekspor luar negeri juga mengalami kontraksi yaitu sebesar 4,24 persen, dan memberikan distribusi hanya sebesar 4,16 persen (Gambar 3).



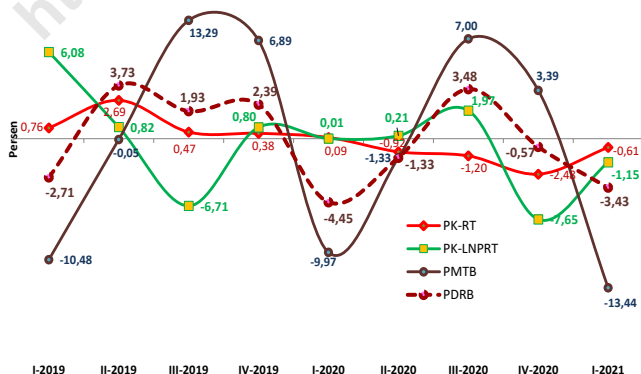
Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh y-on-y (Persen)

Berdasarkan sumbernya, pada triwulan I-2021 sumber pertumbuhan positif terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu

sebesar 6,11 persen. Adapun sumber pertumbuhan negatif berasal dari komponen lainnya, diantaranya adalah komponen PKRT, komponen PMTB, dan ekspor luar negeri masing-masing sebesar 2,92 persen, 1,84 persen, dan 0,17 (Gambar 4).

3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh q - to - q

Perekonomian Aceh pada triwulan I-2021 juga mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar 3,43 persen dibandingkan triwulan IV-2020. Hal ini terjadi hampir pada semua komponen, kecuali komponen ekspor luar negeri yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 62,43 persen. Pertumbuhan terutama disebabkan oleh peningkatan ekspor barang seperti kopi dan batu bara. Sementara itu, komponen lainnya mengalami nilai kontraksi yang bervariasi, paling besar terjadi pada komponen impor luar negeri yaitu mencapai 58,57 persen, terutama pada impor barang. Hal ini disebabkan karena pada triwulan yang lalu (triwulan IV 2020), Provinsi Aceh melakukan impor mesin/pesawat mekanik yang menyebabkan kenaikan pada subkomponen ini sementara pada triwulan ini (triwulan I 2021) tidak banyak melakukan impor barang.

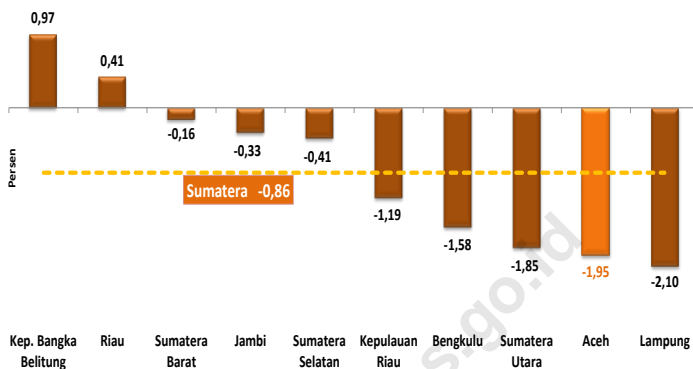


Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh q - to - q (Persen)

Adapun komponen lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu sekitar 18,61 persen, hal ini berkaitan dengan fenomena realisasi anggaran akhir tahun yang lebih besar daripada awal tahun. Sehubungan dengan kegiatan proyek konstruksi yang belum banyak berjalan pada awal tahun maka kondisi ini berpengaruh juga pada komponen PMTB, yaitu mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar 13,44 persen. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT juga mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar 1,15 persen, utamanya disebabkan karena berkurangnya bantuan sosial maupun kegiatan partai. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami kontraksi yaitu sebesar 0,61 persen (Gambar 5).

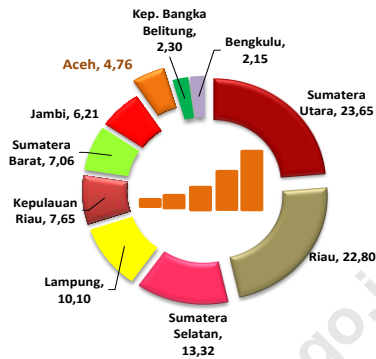
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

Perkembangan ekonomi di wilayah regional Sumatera pada triwulan I 2021 secara tahunan (*y-on-y*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,86 persen dibanding dengan triwulan I 2020. Walaupun secara total mengalami kontraksi pertumbuhan, tetapi masih terdapat dua provinsi yang tidak mengalami kontraksi yaitu, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Riau, masing-masing tumbuh sebesar 0,97 persen dan 0,41 persen. Sementara provinsi lainnya mengalami kontraksi, paling besar terjadi di Provinsi Lampung yaitu sekitar 2,10 persen, dan paling kecil terjadi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sekitar 0,16 persen. Provinsi Aceh sendiri berada pada posisi kedua dengan nilai kontraksi pertumbuhan paling besar di wilayah regional Sumatera, yaitu sekitar 1,95 persen. Perkembangan ekonomi Sumatera Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Aceh juga mengalami kontraksi pertumbuhan paling besar ketiga, yaitu sekitar 1,85 persen (Gambar 6).



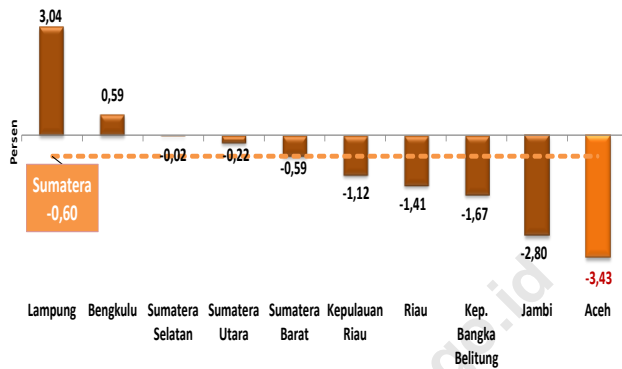
Gambar 6. Pertumbuhan PDRB (*y-on-y*) Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 (Persen)

Jika ditinjau berdasarkan kontribusi dari PDRB masing-masing provinsi di wilayah regional Sumatera terhadap PDRB total se-Sumatera, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 23,65 persen, 22,80 persen, dan 13,32 persen. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen dari PDRB Regional Sumatera triwulan I tahun 2021 berasal dari tiga provinsi tersebut. Kontribusi terkecil terhadap PDRB se-Sumatera adalah Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung yaitu berkontribusi masing-masing 2,15 persen dan 2,30 persen. Sementara itu, Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,76 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan I 2021 dan merupakan kontribusi terendah setelah Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung (Gambar 7).



Gambar 7. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera (y-on-y) Triwulan I tahun 2021 (Persen)

Secara *quarter to quarter (q-to-q)* pertumbuhan ekonomi regional Sumatera juga mengalami kontraksi yaitu sebesar 0,60 persen. Jika dilihat provinsi yang berada pada regional Sumatera, masih terdapat dua provinsi yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu Provinsi Lampung (3,04 persen) dan Provinsi Bengkulu (0,59 persen). Sementara itu, provinsi lainnya mengalami kontraksi, paling parah terjadi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 3,43 persen. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan nilai kontraksi paling kecil yaitu sekitar 0,02 persen. Adapun provinsi Jambi mengalami kontraksi paling besar kedua yaitu sebesar 2,80 persen, sementara provinsi lainnya mengalami kontraksi dengan nilai yang kurang dari 2 persen (Gambar 8).



Gambar 8. Laju Pertumbuhan PDRB q -to- q Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2021 (Persen)

Halaman ini sengaja dikosongkan

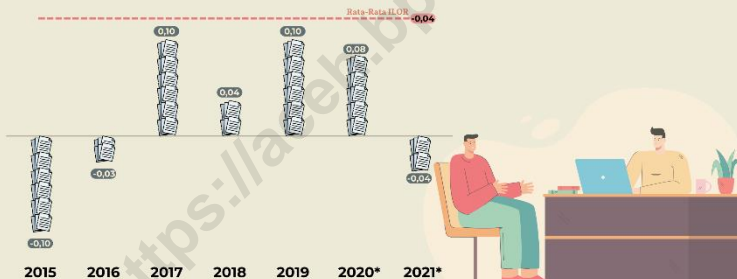
<https://aceh.bps.go.id>

ANALISIS KETERKAITAN PDRB DENGAN KETENAGAKERJAAN

Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Aceh Triwulan I Periode Tahun 2015-2021 (Juta Rp/Orang)



ILOR Provinsi Aceh Triwulan I Periode Tahun 2015-2021



Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Aceh Triwulan I Periode Tahun 2015-2021



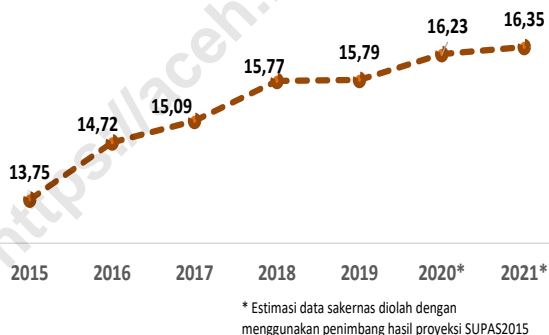
ANALISIS KETERKAITAN PDRB DENGAN KETENAGAKERJAAN

<https://aceh.bps.go.id>

IV. ANALISIS KETERKAITAN PDRB DENGAN KETENAGAKERJAAN

4.1 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal/*Incremental Labour Output Ratio (ILOR)*

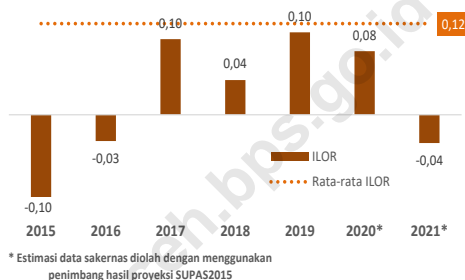
Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) di Provinsi Aceh selama Triwulan I periode tahun 2015-2020 mengalami tren peningkatan, nilai PTK pada triwulan I 2015 mencapai 13,75 juta rupiah per orang dan pada triwulan I 2018 meningkat dengan capaian sekitar 15,77 Juta rupiah per orang, namun pada triwulan I 2019 hanya mengalami sedikit peningkatan dengan capaian sekitar 15,79 juta rupiah hingga akhirnya sampai triwulan I tahun 2021 meningkat menjadi 16,35 juta rupiah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini menunjukkan bahwa meningkatnya kinerja dari setiap tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah PDRB di Provinsi Aceh, hal ini menggambarkan kondisi sedikit lebih baik dibandingkan pada awal masa pandemi yang terjadi di akhir triwulan I 2020 (Gambar 9).



Gambar 9. Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Aceh Triwulan I Periode Tahun 2015-2021 (Juta Rp/Orang)

Besaran penambahan tenaga kerja dan penambahan PDRB jika dihitung setiap tahun akan menghasilkan angka yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat berdasarkan Gambar 10. Nilai *ILOR* pada triwulan I pada tahun 2015 dan 2016 adalah negatif, sedangkan pada triwulan I tahun 2017 sampai 2021 nilai *ILOR* menjadi positif. Oleh karena itu penghitungan *ILOR* dapat dilakukan dengan membuat rata-rata *ILOR* per tahun dalam kurun waktu 6 tahun.

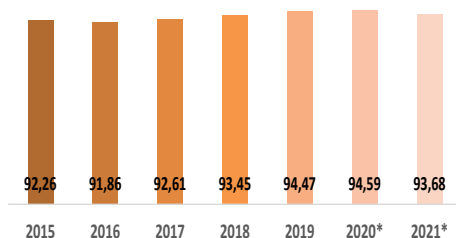
Hasil yang diperoleh adalah nilai *ILOR* pada triwulan I tahun 2015-2021 bernilai positif yaitu 0,12. Hal ini dapat diartikan bahwa, pada triwulan I rata-rata tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi sebanyak 12 orang sebagai akibat adanya kenaikan output sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu, nilai *ILOR* pada triwulan I tahun 2021 sebesar negatif 0,04, dapat diartikan bahwa setiap terjadinya penurunan output sebesar 100 juta rupiah maka terjadi pula pengurangan 4 orang tenaga kerja.



Gambar 10. ILOR Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2015-2021

4.2 Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja penduduk Provinsi Aceh pada triwulan I periode tahun 2015-2021 terlihat fluktuatif. Tingkat kesempatan kerja paling rendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 92,26 persen dan paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 94,59 persen. Sementara itu, pada triwulan I tahun 2021, tingkat kesempatan kerja turun menjadi 93,68 persen. Penurunan kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang banyak menyebabkan perusahaan/pelaku usaha menutup tempat usaha atau mengurangi kegiatan produksi sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Dari angka yang diperoleh, dapat diketahui bahwa peluang seorang penduduk usia kerja di Provinsi Aceh yang termasuk ke dalam angkatan kerja untuk bisa bekerja pada triwulan I 2021 adalah sekitar 93,68 persen (Gambar 11).



* Estimasi data sakernas diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015

Gambar 11. Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2015-2021

Adapun nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh dari tahun 2015 sampai 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2015-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)	Elastisitas	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	-2,06	2,97	-1,44	elastis
2016	3,72	-1,63	-0,44	inelastis
2017	3,85	5,12	1,33	elastis
2018	3,22	1,95	0,61	inelastis
2019	3,84	5,57	1,45	elastis
2020*	3,45	3,80	1,10	elastis
2021*	-1,95	-0,95	0,49	inelastis

*Estimasi data sakernas diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 di atas, didapati selama periode 2015-2021 elastisitas tenaga kerja kondisi triwulan I lebih bervariasi. Terdapat 4 (empat) tahun yang masuk ke dalam kategori elastis berarti persentase perubahan nilai PDRB tahun sebelumnya lebih kecil daripada persentase perubahan

jumlah tenaga kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun selama periode tersebut, terdapat 3 (tiga) tahun yang dikategorikan masuk kategori inelastis, berarti bahwa perubahan persentase nilai PDRB lebih besar daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja.

Sementara itu, kondisi tahun 2021 masuk kategori inelastis, berarti bahwa persentase perubahan nilai PDRB lebih besar daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada triwulan I tahun 2021 tercatat sebesar 2,39 juta orang dengan persentase perubahan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 0,95 persen dibandingkan triwulan I tahun 2020. Begitu juga, persentase perubahan nilai PDRB pada triwulan I 2021 mengalami penurunan sebesar 1,95 persen dibandingkan pada triwulan I tahun 2020.

LAMPIRAN

<https://aceh.bps.go.id>

Lampiran 1. **PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Triliun Rupiah)**

Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	26,52	26,41	25,97	25,52	25,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,91	0,93	0,95	0,89	0,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,23	9,79	9,70	10,58	8,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,26	15,07	16,19	16,82	14,65
5. Perubahan Inventori	-0,19	-0,47	0,08	0,53	0,35
6. Ekspor Luar Negeri	1,77	1,01	1,16	1,14	1,73
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,45	0,09	0,08	0,27	0,13
8. Net Ekspor Antar Daerah	-7,68	-12,53	-11,82	-12,47	-9,79
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	41,37	40,12	42,14	42,74	41,68

Lampiran 2. **PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Triliun Rupiah)**

Komponen	Atas Dasar Harga Konstan				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	18,67	18,50	18,28	17,82	17,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,65	0,65	0,66	0,61	0,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,24	5,95	5,85	6,44	5,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,92	10,78	11,53	11,92	10,32
5. Perubahan Inventori	-0,11	-0,29	0,05	0,28	0,18
6. Ekspor Luar Negeri	1,33	0,76	0,74	0,78	1,27
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,27	0,07	0,06	0,20	0,08
8. Net Ekspor Antar Daerah	-1,72	-4,00	-3,64	-4,45	-3,17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	32,71	32,27	33,40	33,21	32,07

Lampiran 3.

Laju Pertumbuhan c-to-c PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan C to C				
	2020				2021
	Triw I	Triw I-II	Triw I-III	Triw I-IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3,66	1,81	0,65	-0,64	-5,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-5,18	-5,46	-2,76	-3,45	-6,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,91	2,38	-0,44	-8,06	61,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,97	8,27	5,86	3,75	-5,51
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri	39,12	1,99	-9,18	-14,72	-4,24
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-27,30	-70,20	-82,32	-78,53	-70,00
8. Net Ekspor Antar Daerah					
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,45	0,88	0,54	-0,37	-1,95

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan <i>Y on Y</i>				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3,66	0,01	-1,64	-4,45	-5,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-5,18	-5,75	3,02	-5,62	-6,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,91	0,08	-4,57	-22,02	61,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,97	7,58	1,60	-1,72	-5,51
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri	39,12	-30,47	-30,63	-30,09	-4,24
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-27,30	-91,04	-94,65	-61,88	-70,00
8. Net Ekspor Antar Daerah					
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,45	-1,60	-0,10	-2,99	-1,95

Lampiran 5.

Laju Pertumbuhan *q-to-q* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan Q to Q				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	0,09	-0,92	-1,20	-2,48	-0,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,01	0,21	1,97	-7,65	-1,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-60,74	83,53	-1,74	10,15	-18,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-9,97	-1,33	7,00	3,39	-13,44
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri	18,59	-42,84	-2,56	5,85	62,43
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-47,34	-74,63	-12,84	227,43	-58,57
8. Net Ekspor Antar Daerah					
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-4,45	-1,33	3,48	-0,57	-3,43

Lampiran 6. **Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100) Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021**

Komponen	Indeks Implisit				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	142,06	142,75	142,10	143,21	143,15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	140,63	143,40	143,34	145,06	143,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	161,36	164,65	165,89	164,32	164,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,78	139,86	140,46	141,13	142,02
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri	133,23	133,47	156,67	145,53	136,59
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	165,01	129,62	126,64	136,43	157,68
8. Net Ekspor Antar Daerah					
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	126,50	124,31	126,20	128,71	129,97

Lampiran 7. **Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)**

Komponen	Laju Indeks Implisit				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1,39	0,49	-0,46	0,78	-0,04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,40	1,97	-0,05	1,20	-1,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,96	2,03	0,75	-0,94	0,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,14	0,06	0,43	0,47	0,64
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri	1,72	0,18	17,38	-7,11	-6,14
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,16	-21,45	-2,30	7,73	15,58
8. Net Ekspor Antar Daerah					
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,11	-1,73	1,52	1,99	0,98

Lampiran 8. **Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)**

Komponen	Distribusi				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	64,10	65,83	61,63	59,72	60,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,20	2,32	2,25	2,07	2,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,64	24,41	23,01	24,75	20,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,89	37,57	38,43	39,36	35,16
5. Perubahan Inventori	-0,46	-1,18	0,19	1,23	0,83
6. Ekspor Luar Negeri	4,27	2,52	2,74	2,66	4,16
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	1,08	0,22	0,18	0,63	0,31
8. Net Ekspor Antar Daerah	-18,56	-31,24	-28,06	-29,17	-23,49
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 9. **Sumber Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan I 2021 (Persen)**

Komponen	Sumber Pertumbuhan Y on Y				
	2020				2021
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2,08	0,01	-0,91	-2,43	-2,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-0,11	-0,12	0,06	-0,11	-0,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,66	0,01	-0,84	-5,31	6,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,84	2,31	0,54	-0,61	-1,84
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri	1,18	-1,01	-0,98	-0,98	-0,17
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,32	-2,13	-3,18	-0,93	-0,58
8. Net Ekspor Antar Daerah					
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,45	-1,60	-0,10	-2,99	-1,95

Lampiran 10. **Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan I 2021**

Provinsi Regional Sumatera	PDRB ADHB Triwulan I 2021 (Triliun Rupiah)	Distribusi PDRB ADHB Triwulan I 2021 (persen)	Laju Pertumbuhan Triwulan I 2021 (persen)	
			<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	41,68	4,76	-3,43	-1,95
Sumatera Utara	207,00	23,65	-0,22	-1,85
Sumatera Barat	61,76	7,06	-0,59	-0,16
Riau	199,55	22,80	-1,41	0,41
Jambi	54,33	6,21	-2,80	-0,33
Sumatera Selatan	116,55	13,32	-0,02	-0,41
Bengkulu	18,85	2,15	0,59	-1,58
Lampung	88,39	10,10	3,04	-2,10
Kep. Bangka Belitung	20,10	2,30	-1,67	0,97
Kepulauan Riau	66,92	7,65	-1,12	-1,19
SUMATERA	875,11	100,00	-0,60	-0,86

DAFTAR PUSTAKA

<https://aceh.bps.go.id>

Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran 2016-2020, Banda Aceh.

-----, 2021, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh 2016-2020, Banda Aceh.

-----, 2021, PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2020, Banda Aceh.

-----, 2020, PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan III-2020, Banda Aceh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2017, Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kabupaten Lumajang Tahun 2017, Lumajang.

Anton Trianto, Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan, 2017, Akuisisi-vol 13 No. 1 April 2017, Palembang.

<https://www.aceh.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

<http://www.aceh.bps.go.id> Email: bps1100@bps.go.id



9 772502 086008